

## Edukasi Pendampingan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar

Syahril<sup>1</sup>, Ahmad Faqhruddin Abdur-Rabb<sup>2</sup>, Rahmat Aiman<sup>3</sup>, Fadil Muhammad<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Makassar, Makasaar, Indonesia; email: [syahril@unm.ac.id](mailto:syahril@unm.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Negeri Makassar, Makasaar, Indonesia; email: [ahmad.faqhruddin@unm.ac.id](mailto:ahmad.faqhruddin@unm.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Negeri Makassar, Makasaar, Indonesia; email: [rahmat.aiman@unm.ac.id](mailto:rahmat.aiman@unm.ac.id)

<sup>4</sup> Universitas Negeri Makassar, Makasaar, Indonesia; email: [fadil.muhammad@unm.ac.id](mailto:fadil.muhammad@unm.ac.id)

---

### Kata Kunci

Kemiskinan, RPKD, perencanaan pembangunan daerah, tata kelola, Kota Makassar

### Abstrak

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang juga diadopsi oleh Pemerintah Kota Makassar dalam dokumen perencanaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pendampingan dan fasilitasi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Makassar periode 2025–2029 sebagai instrumen strategis dalam mempercepat penurunan kemiskinan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan tahapan kegiatan meliputi *kick-off meeting*, pengumpulan data makro dan mikro sektoral, analisis komparatif dan *time series*, penyusunan dokumen melalui *focus group discussion* (FGD), serta diseminasi dokumen kepada pemangku kepentingan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyusunan RPKD mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis data, yang memuat strategi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan. Strategi tersebut mencakup peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyediaan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, serta perluasan perlindungan sosial. Selain itu, penguatan tata kelola kelembagaan dan pemutakhiran data kemiskinan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas program.

---

### Key Word

*Poverty, Regional Poverty Alleviation Plan (RPKD), regional development planning, governance, Makassar City*

### Abstract

*Poverty alleviation constitutes one of the national priorities outlined in Indonesia's 2025–2029 National Medium-Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN), which has also been adopted by the Government of Makassar City in its regional development planning documents. This study aims to describe the assistance and facilitation process in the formulation of the Regional Poverty Alleviation Plan (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah/RPKD) of Makassar City for the 2025–2029 period as a strategic instrument for accelerating poverty reduction. The study employed a descriptive approach, with activities encompassing kick-off meetings, collection of macro and micro sectoral data, comparative and time-series analyses, preparation of the planning document through focus group discussions (FGDs), and dissemination of the document to relevant*

stakeholders. The findings indicate that the formulation of the RPKD successfully produced a comprehensive, integrated, and data-driven planning document that incorporates cross-sectoral strategies for poverty alleviation. These strategies include improving access to education and healthcare services, expanding employment opportunities, promoting community economic empowerment, providing basic infrastructure, strengthening food security, and broadening social protection coverage. Furthermore, strengthening institutional governance and updating poverty data were identified as key factors in enhancing the effectiveness of poverty alleviation programs.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Journal homepage: <https://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PICS/index>

## A. Pendahuluan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 memasukkan penganggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas nasional. Karena menjadi prioritas nasional, maka pemerintah Kota Makassar juga menjadikan kemiskinan sebagai salah satu permasalahan strategis dalam Pembangunan daerah lima tahun kedepan. Hal itu tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar periode 2025-2029.

Agar upaya penanggulangan kemiskinan terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, pemerintah pusat membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 Tentang Badan Percepatan Pengentasan kemiskinan. Badan ini diberi tugas untuk menyelenggarakan dukungan percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu, beberapa diantaranya adalah penyesuaian kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan. Instrumen yang digunakan pemerintah dalam koordinasi, penyesuaian, dan evaluasi program penanggulangan adalah dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Itu sebabnya, pemerintah Kota Makassar menyusun dokumen RPKD, tak hanya sekedar upaya mensinergikan antara program penanggulangan kemiskinan nasional dan daerah, tapi juga menjadi peta jalan bagi semua pemangku kepentingan dalam lima tahun ke depan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan.

Pemerintah Kota Makassar menyusun dokumen RPKD periode tahun 2025-2029 berdasar pada (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyesuaian Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, 2020). Penyusunan RPKD Kota Makassar secara argumentatif disusun karena mengacu pada pemahaman bahwa setiap daerah memiliki karakteristik kemiskinannya masing-masing, sehingga upaya percepatan pengentasan kemiskinan harus dirancang sesuai karakteristik daerah tersebut. Kemiskinan di Kota Makassar lebih bercorak kemiskinan perkotaan, dimana dimensi struktural dan kultural dari kemiskinan tersebut terkonstruksi oleh ruang sosio-spasial Kota Makassar serta relasinya dengan daerah lain.

Secara struktural, Makassar ditandai oleh heterogenitas sosial yang tinggi, dalam arti di dalamnya hidup beragam suku, etnis, dan agama. Struktur sosial-ekonomi Kota Makassar ditandai oleh stratifikasi sosial yang tajam antara lapisan sosial yang

kaya dengan lapisan sosial yang miskin. Dokumen ini urgen disusun pemerintah kota karena inilah yang menjadi dasar formal bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam penanggulangan kemiskinan, Pemerintah pusat hanya menetapkan kebijakan umum yang bersifat luas dan prinsip-prinsip dasar. Dokumen kebijakan dari pusat sering kali dibuat samar agar memberikan ruang fleksibilitas bagi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membuat dokumen rencana mereka sendiri (sering disebut sebagai peraturan terperinci) untuk membuat kebijakan pusat tersebut menjadi praktis dan dapat dilaksanakan di tingkat akar rumput (Tsai & Tian, 2022).

Penyusunan dokumen RPKD bersifat kompleks karena menggunakan pendekatan teknokratik. Dalam tahapannya, tim penyusun harus mengumpulkan, menganalisis data, dan akhirnya merumuskan kebijakan yang akan diimplementasikan. Proses itu, dinilai sulit dilaksanakan oleh pemerintah kota, dalam hal ini Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda Kota Makassar secara independen, sehingga dirasa membutuhkan fasilitasi dan pendampingan dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu, kegiatan ini selain diharapkan dapat menghasilkan satu dokumen RPKD, juga diharapkan dapat memperkuat prioritas penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah terkait, dan Renja Perangkat Daerah terkait yang tertuang dalam dokumen perencanaan khusus (RPKD), dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjabarkan dan mendukung penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari Asta Cita dan Sustainable Development Goals (SDGs).

## **B. Metode Pelaksanaan**

### **1. Pendekatan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan pendampingan dan fasilitasi penyusunan dokumen RPKD Kota Makassar periode 2025-2029 dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Kegiatan bertahap ditujukan agar dokumen yang dihasilkan dapat memuat hal-hal strategis dalam penanggulangan kemiskinan, dan yang paling penting melibatkan semua pemangku kepentingan. Tahapan kegiatan ini terdiri dari

1. Tahap pertama adalah *Kick off meeting* bersama seluruh perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kota Makassar yang termasuk dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar. Pada tahap pertama ini, Tim dari Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda Kota Makassar menjelaskan urgensi penanggulangan kemiskinan daerah dan penyusunan RPKD. Kegiatan ini dilaksanakan di ruangan Ruang Rapat Sipakalebbi Lt. 2, Kantor Walikota Makassar. Secara teknis, kegiatan ini dimulai dengan pembukaan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan menyampaikan pentingnya semua perangkat daerah terlibat dalam penanggulangan kemiskinan. Setelah itu, tim pendamping dan fasilitator menjelaskan secara garis besar apa yang sudah dicapai Kota Makassar dalam penanggulangan kemiskinan lima tahun terakhir dan apa saja tantangan yang dihadapi untuk lima tahun kedepan.
2. Tahap kedua yaitu pengumpulan data. Tahapan ini sangat krusial karena dalam penyusunan dokumen RPKD, data menjadi bagian yang elementer. Pada tahapan ini, data yang dikumpulkan adalah data-data yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yang dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu data makro dan data mikro sektoral. Data makro adalah data-data yang berkaitan

dengan penanggulangan kemiskinan pada level impact atau outcomes seperti data jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dll. Data ini mencakup aspek sosial ekonomi Kota Makassar. Semua data makro tersebut sebagian besar dikumpulkan melalui penelusuran website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pusat Statistik Kota Makassar, dan kementerian serta perangkat daerah terkait. Data yang dikumpulkan adalah data time series dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2020-2025). Jenis data selanjutnya yang dikumpulkan adalah data mikro sektoral. Data mikro sektoral adalah data spesifik terkait kemiskinan yang umumnya dihasilkan oleh perangkat daerah yang termasuk dalam tim penanggulangan kemiskinan. Data yang dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan aspek penanggulangan kemiskinan seperti aspek pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, UMKM, dll.

3. Tahap ketiga adalah analisis data. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul, dianalisis menggunakan dua metode analisis yaitu analisis komparasi dan analisis time series berbasis grafik. Analisis komparasi adalah analisis yang membandingkan antar kondisi Kota Makassar dengan wilayah yang setara atau yang lebih tinggi. Misalnya membandingkan antara persentase penduduk miskin Kota Makassar dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan membandingkan antar Kota Makassar dengan level provinsi dan nasional. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan posisi relatif Kota Makassar dalam semua parameter kemiskinan agar dapat dirumuskan permasalahan dan strategi yang diperlukan. Analisis time series berbasis grafik merupakan analisis yang menjadi perubahan angka parameter terkait kemiskinan dalam lima tahun terakhir. Analisis ini digunakan untuk mengetahui fluktuasi dan menganalisis penyebab fluktuasi tersebut.
4. Tahap keempat adalah penyusunan dokumen. Pada tahap ini, selain merampungkan analisis data, tim penyusun juga mulai merumuskan strategi, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, dan target yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Agar lebih komprehensif, kegiatan ini dilaksanakan dengan metode *focus group discussion* (FGD). Peserta yang hadir dalam FGD tersebut adalah perwakilan seluruh perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kota Makassar yang masuk dalam tim penanggulangan kemiskinan Kota Makassar. Fokus diskusi diarahkan pada formulasi strategi dan kebijakan, serta merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta indikator, target, dan pagu anggaran untuk masing-masing urusan pemerintahan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.
5. Tahap kelima atau tahap terakhir adalah diseminasi dokumen. Pada tahap ini, draf dokumen RPKD didiseminasikan atau didiskusikan bersama seluruh pemangku kepentingan. Peserta diseminasi tak hanya berasal dari perangkat daerah, tapi juga dihadiri oleh Tim Ahli Walikota Makassar yang terdiri dari unsur pekerja sosial, pemerintahan, dan akademisi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan (input) dalam rangka menyempurnakan dokumen RPKD.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Hasil dan Pembahasan dalam artikel pengabdian masyarakat idealnya dimulai dengan deskripsi kegiatan yang telah dilakukan. Penulis dapat menjelaskan prosedur dan tahapan kegiatan secara terstruktur, termasuk waktu pelaksanaan serta

keterlibatan anggota komunitas atau kelompok sasaran dalam kegiatan tersebut. Dampak kegiatan, terutama perubahan atau manfaat sosial yang dirasakan langsung oleh komunitas, juga perlu diuraikan sebagai hasil kegiatan pengabdian yang dapat diukur dan dirasakan. Di bagian ini, refleksi terhadap proses pelaksanaan kegiatan, seperti tantangan yang dihadapi, solusi yang diterapkan, serta evaluasi keberhasilan atau hambatan kegiatan, juga sangat relevan untuk disertakan. Pembahasan dapat diakhiri dengan analisis tentang bagaimana hasil kegiatan tersebut berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat, serta memberikan relevansi konsep yang digunakan atau pelajaran penting yang bisa diterapkan di kegiatan serupa lainnya.

Dokumentasi berupa foto kegiatan dan grafis pendukung lain dapat disertakan, terutama untuk menggambarkan situasi di lapangan, keterlibatan anggota masyarakat, dan aktivitas yang berlangsung selama kegiatan pengabdian. Pastikan foto dan elemen grafis yang digunakan memiliki resolusi sehingga dapat ditampilkan dengan maksimal.

Penyusunan dokumen RPKD Kota Makassar periode 2025-2029 melalui lima tahapan kegiatan. Disemua tahapan tersebut keterlibatan semua pemangku kepentingan merupakan penekanan paling penting. Pelibatan semua pemangku kepentingan dalam semua tahapan kegiatan sangat penting untuk memastikan agar proses identifikasi akar masalah kemiskinan dan kebutuhan riil, bukan sekadar asumsi pemerintah/tim fasilitator saja (Karki, 2024; Pira et al., 2024) dan membuat tantangan proyek lebih mudah diatasi sepanjang siklus program (Zikargae et al., 2022). Berikut detail tahapan kegiatan dalam pendampingan penyusunan dokumen RPKD Kota Makassar yang dilaksanakan selama lima (bulan)

### **1. Kick off Meeting**

Tahapan pertama adalah kick off meeting antara semua tim penyusun dan pendamping, termasuk seluruh perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kota Makassar yang masuk sebagai tim penanggulangan kemiskinan. Kegiatan ini merupakan penyamaan persepsi tentang urgensi pengentasan kemiskinan Kota Makassar dan pentingnya menyusun dokumen RPKD. Gambar di bawah ini merupakan dokumentasi kegiatan kick-off meeting yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025.



**Gambar 1.** Dokumentasi Kegiatan *Kick off Meeting* Penyusunan Dokumen RPKD Kota Makassar Tahun 2025-2029

Pada kegiatan *kick-off meeting*, peserta yang hadir adalah perwakilan seluruh perangkat daerah yang termasuk tim penanggulangan kemiskinan Kota Makassar dan tim fasilitator. Kegiatan ini membahas permasalahan kemiskinan dan apa yang perlu dilakukan lima tahun kedepan, serta masukan dalam penyusunan dokumen RPKD. Kegiatan ini menghasilkan beberapa tantangan penanggulangan kemiskinan seperti hambatan koordinasi lintas sektor, hambatan pelibatan pihak non pemerintah, dan hambatan kualitas data, angka kemiskinan yang masih belum mencapai target, masih banyaknya penduduk miskin ekstrem, dll. Sebagai respon atas tantangan tersebut, tim pendamping memberi masukan kepada peserta yang hadir, bahwa:

- i) Untuk mengatasi tantangan koordinasi lintas sektor, penting bagi Bappeda Kota Makassar untuk memperkuat tim penanggulangan kemiskinan tersebut. Selain itu, perlu dirumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang akan mengikat semua perangkat daerah dan menjadi landasan dalam mengimplementasikan program penanggulangan kemiskinan daerah. Solusi lain yang diberikan adalah perumusan secara komprehensif *teory of change (TOC)* yang merupakan salah satu bagian dalam dokumen RPKD. TOC menjadi panduan teknis semua perangkat daerah dalam mengintervensi masalah kemiskinan. Dalam tulisan Vernooy (2022) dan Huang et al (2022) ToC memaksa perencana menjabarkan rantai kausal input ke kegiatan, kemudian ke output, ke outcome, dan akhirnya sampai pada dampak (penurunan kemiskinan), sehingga tidak berhenti di kegiatan saja. Selain itu, pembuatan ToC kemudian dapat memudahkan evaluator untuk menguji tiap mata rantai kausal, apakah kegiatan benar-benar menghasilkan perubahan yang diharapkan (Vernooy, 2022).
- ii) Pelibatan pihak non pemerintah juga menjadi salah satu concern dalam kegiatan *kick-off meeting*. Hal itu mengemuka karena pemerintah kota tidak memungkinkan menanggulangi kemiskinan secara mandiri, tanpa kolaborasi dengan pihak lain, karena keterbatasan sumber daya, terutama anggaran. Untuk menyelesaikan hambatan ini, tim pendamping memberi masukan teknis dengan mulai melakukan pendataan terhadap seluruh pihak eksternal yang memungkinkan dapat membantu dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Saran yang disampaikan tim pendamping misalnya pelibatan Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan pemanfaatan CSR perusahaan yang ada di Kota Makassar. Selain itu, tim pendamping juga memberi masukan tentang pentingnya melibatkan lembaga swadaya masyarakat. Pelibatan NGO dalam penanggulangan kemiskinan dapat menutup kesenjangan layanan, sumber daya, dan kapasitas pemerintah, misalnya dalam kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial bagi kelompok rentan (Doshmangir et al., 2025; Sanadgol et al., 2021).
- iii) Untuk menyelesaikan masalah kualitas data, tim pendamping menekankan pentingnya pemerintah Kota Makassar untuk melakukan monitoring dan evaluasi, serta updating terhadap data penanggulangan kemiskinan, terutama data yang digunakan dalam pensasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan. Menurut data yang disajikan tim pendamping, data penerima manfaat (individu maupun rumah tangga miskin) masih mengalami inclusion dan exclusion error yang tinggi. Dalam paper yang ditulis oleh Reddy et al (2022) dan Blake & Gibbison (2025), Tingginya exclusion error berarti rumah tangga termiskin tidak menerima bantuan, sehingga dampak pengurangan kemiskinan sangat berkurang, dan inclusion error membuat sumber daya terbagi ke rumah tangga yang tidak miskin, mengurangi dana untuk individu atau rumah tangga yang benar-benar miskin.

iv) Tim pendamping menyarankan agar proses validasi dan verifikasi faktual data DTSEN yang menjadi basis data penerima manfaat, dilakukan secara hati-hati, menyeluruh, dan terukur. Pemerintah kota bisa melibatkan tim pendamping PKH yang sudah mendampingi rumah tangga miskin, sehingga mereka punya pengetahuan terhadap kondisi rumah tangga yang mereka dampingi. Saat satu individu atau rumah tangga sudah dibantu oleh pemerintah dan pemerintah kota, seringkali tidak ada penanda bahwa individu atau rumah tangga tersebut sudah mendapat bantuan. Hal ini menyulitkan pemerintah kota dalam memperbaiki kualitas data, sehingga sangat mungkin individu atau rumah tangga yang sama, mendapatkan bantuan berkali-kali. Oleh karena itu, tim pendamping menyarankan agar Bappeda membangun sistem informasi basis data terintegrasi yang dapat dimonitoring oleh semua tim yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan.

Selain masukan atas hambatan yang dihadapi perangkat daerah, tim pendamping juga memberikan pemahaman baru kepada seluruh peserta yang hadir. Saat proses penyusunan dokumen RPKD dimulai, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan merilis sebuah dokumen yang berjudul Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025-2029. Dokumen ini mengubah pendekatan penanggulangan kemiskinan. Sebelum dokumen tersebut dirilis, implementasi program penanggulangan kemiskinan bisa dilaksanakan pada lokasi prioritas yang berbeda-beda. Misalnya, program penyelesaian siswa putus sekolah bisa dilaksanakan di Kecamatan A, dan program perbaikan gizi dilaksanakan di Kecamatan B.

Dalam dokumen Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025-2029, pendekatan ini tidak lagi digunakan, karena semua individu dan rumah tangga miskin harus melewati tiga fase pengentasan kemiskinan yaitu fase dukungan dasar, fase pemberdayaan, pendampingan, dan mentoring, dan fase penciptaan pendapatan dan pengembangan aset. Implikasinya adalah semua individu maupun rumah tangga harus mendapatkan semua program penanggulangan kemiskinan, khususnya pada fase dukungan dasar.

## 2. Pengumpulan Data

Tahapan kedua dalam penyusunan dokumen RPKD Kota Makassar adalah pengumpulan data. Pada tahapan ini ada ratusan indikator yang harus dikumpulkan datanya untuk selanjutnya dianalisis. Tabel berikut menyajikan contoh beberapa indikator yang datanya dikumpulkan.

**Tabel 1.** Contoh Kebutuhan Data yang Dikumpulkan dalam Penyusunan Dokumen RPKD Kota Makassar 2025-2029

No	Jenis Data	Sumber Data	Rentan Waktu
1	Persentase penduduk miskin Kota Makassar	Badan Pusat Statistik	Tahun 2020-2024
2	Jumlah penduduk miskin Kota Makassar	Badan Pusat Statistik	Tahun 2020-2024
3	Indeks kedalaman kemiskinan Kota Makassar	Badan Pusat Statistik	Tahun 2020-2024
4	Indeks keparahan kemiskinan Kota Makassar	Badan Pusat Statistik	Tahun 2020-2024

No	Jenis Data	Sumber Data	Rentan Waktu
5	Struktur Penduduk (jiwa) Kota Makassar menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	Badan Pusat Statistik	Tahun 2020-2024
6	Rasio Ketergantungan (%) Kota Makassar	Badan Pusat Statistik	Tahun 2020-2024
7	Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar	Badan Pusat Statistik	Tahun 2020-2024
8	Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan	Badan Pusat Statistik	Tahun 2020-2024
9	Pertumbuhan ekonomi Indonesia	Badan Pusat Statistik	Tahun 2020-2024
10	Tingkat pengangguran terbuka Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan Indonesia	Badan Pusat Statistik	Tahun 2020-2024
11	Indeks ketidakcukupan pangan	Badan Pusat Statistik	Tahun 2020-2024
12	Indeks ketahanan pangan	Badan Pusat Statistik	Tahun 2020-2024
13	Indeks Pembangunan TIK Kota Makassar	Badan Pusat Statistik	Tahun 2020-2024
14	Persentase rumah tangga menurut status penguasaan bangunan tempat tinggal di Kota Makassar	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tahun 2020-2024
15	Jumlah rumah tidak layak huni Kota Makassar	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tahun 2020-2024
16	Luas kawasan kumuh Kota Makassar	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tahun 2020-2024
17	Usia Harapan Hidup (UHH) di Kota Makassar	Dinas Kesehatan	Tahun 2020-2024
18	Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Makassar	Dinas Kesehatan	Tahun 2020-2024
19	Harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan indeks pendidikan Kota Makassar	Dinas Pendidikan	Tahun 2020-2024
20	Angka putus sekolah akumulasi pada jenjang SD dan SMP Kota Makassar	Dinas Pendidikan	Tahun 2020-2024

Pada tahapan ini, tim pendamping bertugas untuk menyusun matriks

kebutuhan data yang akan dikumpulkan. Matriks tersebut akan diserahkan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti dengan pengumpulan data. Kebutuhan data yang dimasukkan tim pendamping dalam matriks disesuaikan dengan indikator yang dibutuhkan dalam menyusun dokumen RPKD, di mana semua indikatornya terfokus pada isu kemiskinan.

Untuk memudahkan proses pengumpulan data, tim pendamping menyarankan agar Bappeda selaku penanggung jawab kegiatan, membuat link *google sheet*. Masing-masing penanggung jawab data di perangkat daerah memasukkan data yang sudah terkumpul dalam link tersebut. Ini memudahkan tim pendamping untuk memonitoring kegiatan pengumpulan data.

### 3. Analisis Data

Sebagian besar proses analisis data pada dokumen RPKD Kota Makassar Periode 2025-2029 digunakan dalam menguraikan kondisi umum dan kondisi kemiskinan daerah, serta bagian program, kegiatan dan lokasi prioritas pengentasan kemiskinan. Dalam menguraikan kondisi umum dan kondisi kemiskinan daerah, analisis komparasi dan *time series* digunakan untuk menggambarkan lanskap terkini kemiskinan di Kota Makassar. Dari proses pendampingan terhadap analisis data, ditemukan bahwa tingkat kemiskinan Kota Makassar tergolong menurun secara fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Tahun 2022, tingkat kemiskinan Makassar turun dari 4,82 persen ke 4,58 persen, tapi setahun kemudian naik sampai 5,07 persen. Kenaikan tersebut salah satunya dipicu oleh kenaikan harga bahan pangan, terutama harga beras yang berdampak langsung pada kenaikan garis kemiskinan Kota Makassar. Di tahun 2025, tingkat kemiskinan Kota Makassar berada posisi terendah dalam lima tahun terakhir, yaitu sebesar 4,43 persen.

Tren penurunan tingkat kemiskinan Kota Makassar sejalan dengan perubahan jumlah penduduk miskinnya. Jumlah penduduk miskin Kota Makassar cenderung bertambah setiap tahunnya, tapi perubahannya cenderung turun. Kota Makassar pernah memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 80,32 ribu jiwa tahun 2023, melonjak dari tahun sebelumnya yang jumlahnya hanya 70 ribuan jiwa. Jumlah penduduk miskin tahun 2023, bertambah 11,82 persen dibandingkan setahun sebelumnya hanya 71,83 ribu jiwa. Tahun 2024, jumlah penduduk miskin berkurang ke 79,53 ribu jiwa atau turun 0,98 persen, dan berlanjut di tahun 2025 dengan besaran penurunan 9,93 persen dan total penduduk miskinnya mencapai 71.63 ribu jiwa. Volatilitas yang tinggi selama lima tahun terakhir menegaskan perlunya kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pendapatan rumah tangga miskin dan mencegah kembali terjadinya lonjakan kemiskinan di masa depan.

Meninjau dokumen induk seperti RPJMD juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam proses analisis data bagi dokumen RPKD. Hal ini ditekankan dalam proses pendampingan sehingga target dan parameter ketercapaian dapat diuraikan secara komprehensif di dalam dokumen. Merujuk pada RPJMD periode 2021-2026, pemerintah kota menetapkan target tingkat kemiskinan yang terus menurun sebagai bentuk optimisme pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Tahun 2022, tingkat kemiskinan ditargetkan 4,40 persen, dan terus menurun hingga 4,10 persen di tahun 2025. Tapi alih-alih turun, realisasi tingkat kemiskinan Kota Makassar justru cenderung naik dari 4,58 persen tahun 2022, kemudian 5,07 persen tahun 2023, dan 4,97 persen di tahun 2024. Tahun 2025, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan ke level paling rendah dalam lima tahun terakhir, namun tetap belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Penurunan ke level paling rendah bisa menjadi

momentum bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga penurunan tingkat kemiskinan hingga akhirnya sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

Selanjutnya, tim pendamping juga meminta tim Bappeda Kota Makassar untuk menguraikan aspek kemiskinan dari konteks geografisnya. Makassar menjadi pusat pertumbuhan dan pasar utama di Sulawesi Selatan dengan berbagai layanan publik yang relatif lebih mudah dan lebih luas diakses oleh masyarakat secara umum. Hal ini menjadi faktor yang menarik migrasi penduduk ke dalam Kota Makassar, dan menetap. Dalam tunjauan akademis, hubungan antara urbanisasi dan kemiskinan berlangsung secara kuat dengan pola non-linier, berbentuk U-Shape (Ahimah-Agyakwah et al., 2022; Ha et al., 2021; Liddle, 2017). Tahap awal urbanisasi membantu menurunkan kemiskinan karena banyak orang desa pindah ke kota dan mendapatkan pekerjaan dengan upah lebih tinggi; uang kiriman (remittance) dari pekerja kota membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa; dan pertumbuhan sektor non pertanian dan jasa di kota meningkatkan kesempatan ekonomi secara umum. Akan tetapi, jika tidak terkendali, urbanisasi akan berbalik meningkatkan kemiskinan karena urbanisasi berlebihan menciptakan ketimpangan pendapatan dan memperlebar jurang sosial, terutama antara penduduk lama dan pendatang miskin. Keterbatasan infrastruktur dan layanan publik (seperti perumahan, sanitasi, dan transportasi) membuat banyak pendatang tinggal di kawasan kumuh. Pertumbuhan lapangan kerja formal tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk kota, sehingga pengangguran meningkat. Menurut Ravallion et al. (2007), dalam kondisi seperti ini, kemiskinan “berpindah tempat” menjadi kemiskinan perkotaan, di mana jumlah orang miskin di kota meningkat lebih cepat daripada penurunan kemiskinan di pedesaan. Dari konteks ini, urbanisasi menjadi salah satu tantangan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar.

Secara keseluruhan, proses pendampingan analisis data dalam penyusunan RPKD Kota Makassar tidak hanya mengamati aspek kemiskinan secara khusus, tetapi juga memperhatikan dinamika ekonomi makro daerah, perkembangan indikator pendidikan, kesehatan, pangan, serta hunian. Berbagai dimensi tersebut digambarkan secara komprehensif untuk membantu pemerintah kota dalam menyediakan strategi yang relevan dengan amanat Rencana Induk Percepatan Penurunan Kemiskinan Nasional dan program masing-masing OPD di level pemerintah Kota Makassar.

#### **4. Penyusunan Dokumen**

Penyusunan dokumen RPKD Kota Makassar dilakukan dengan mempertimbangkan komponen telah disediakan di dalam Rencana Induk Percepatan Penurunan Kemiskinan Nasional. Di dalam dokumen tersebut, terdapat beberapa komponen dokumen utama, seperti pendekatan dalam pengentasan kemiskinan, sistem penargetan nasional, perlindungan sosial komprehensif, inklusif dan adaptif, strategi graduasi kemiskinan, ekosistem semi-closed-loop supply chain, kerangka pelaksanaan dan pengendalian, kerangka pendanaan dan linimasa pentahapan pengentasan kemiskinan. Dokumen RPKD Kota Makassar yang disusun memuat sebagian besar komponen tersebut dengan sistematika yang disesuaikan dengan dokumen RPKD dari periode sebelumnya. Komponen dokumen RPKD Kota Makassar Tahun 2025-2029, di antaranya:

- a) Pendahuluan: memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dan peran TKPKD dalam penyusunan RPKD
- b) Kondisi Umum dan Kondisi Kemiskinan Daerah: memuat kondisi umum daerah yang diamati dari berbagai parameter pembangunan, seperti kependudukan,

perekonomian makro daerah, pendidikan, kesehatan, pangan, dan hunian, serta kondisi kemiskinan secara komprehensif, termasuk capaian kinerja kemiskinan dimensional

- c) Strategi penanggulangan kemiskinan daerah: memuat strategi kolaborasi multipihak, strategi promosi ekonomi kolektif, strategi pemberdayaan komunitas lokal, strategi graduasi kemiskinan.
- d) Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan: memuat program dan kegiatan berdasarkan urusan, serta lokasi prioritas pengentasan kemiskinan.
- e) Kerangka implementasi dan evaluasi: memuat kaidah implementasi dan kaidah evaluasi

Pada prosesnya, masing-masing anggota tim fasilitator dibagi untuk mengasistensi tim Bappeda Kota Makassar secara lebih mendalam untuk menyusun setiap komponen RPKD. Pembagian ini dilakukan guna mengefisienkan waktu pengerjaan sekaligus mempermudah penyamaan persepsi terhadap konsep dan diskusi yang dikembangkan. Dengan pola koordinasi yang terstruktur tersebut, seluruh pihak dapat merespon dinamika perencanaan secara lebih cepat dan selaras.

Lebih detail pada penyusunan bagian program dan kegiatan, tim fasilitator menyediakan instrumen berupa matriks program untuk menangkap relevansi program, kegiatan, dan sub-kegiatan dan indikator-indikatornya, termasuk menunjukkan setiap program terhadap strategi graduasi kemiskinan. Hasil penyusunan matriks tersebut disajikan secara lengkap termasuk target dan nilai anggaran per tahun dalam periode 2025-2029. Tantangan yang dihadapi pada bagian ini adalah terkait perumusan indikator kegiatan, subkegiatan, dan target. Indikator kegiatan dan subkegiatan yang diajukan oleh forum TKPKD harus berupa indikator yang jelas dengan menyebutkan kriteria individu atau rumah tangga miskin pada setiap indikatornya. Artinya tidak diperkenankan lagi jika indikator yang memuat kriteria masyarakat.

Sebagai contoh, bunyi indikator yang selama ini disediakan adalah “jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota” pada subkegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, perlu diubah menjadi “jumlah orang miskin yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota”, sehingga dokumen RPKD yang disusun sepenuhnya memiliki kekuatan pada arah strategis pengentasan kemiskinan yang secara langsung diamanatkan pada masing-masing OPD di Kota Makassar. Kendalanya adalah ketika perumusan target per tahun. Sebagian besar OPD belum menyediakan data *by name by address* dari individu yang termasuk sebagai kelompok sasaran programnya selama ini. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi yang disadari seluruh OPD. Sebagai jalan keluar, perumusan target dilakukan dengan mengedepankan asas proporsionalitas dari sasaran, agar dapat mengidentifikasi individu atau rumah tangga miskin dari setiap subkegiatan yang dijalankan.

NO.	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Deskripsi Singkat Keterkaitan Sub Kegiatan Dengan Kemiskinan	Indikator (Harus Menargetkan Individu/RT Miskin)	Satuan	STRATEGI 2: PENCIPTAAN PENDAPATAN									
					TARGET									
					2025		2026		2027		2028		2029	
	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
Program Pendaftaran Penduduk														
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
1	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pemberian bantuan pengembangan ekonomi bagi masyarakat miskin yang akan graduasi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan	Orang	100	178.600.000	100	356.500.000	100	356.500.000	100	356.500.000	100	356.500.000

**Gambar 1.** Matriks Program, Kegiatan, Subkegiatan menurut Urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial

## 5. Diseminasi Dokumen

Forum diseminasi ini tidak hanya menjadi ruang diskusi bagi perangkat daerah, tetapi juga diperkaya oleh kehadiran tim ahli wali Kota Makassar yang merepresentasikan unsur pekerja sosial, birokrat, dan akademisi. Keterlibatan lintas sektor ini bertujuan untuk menggali masukan serta kritik konstruktif guna menyempurnakan substansi dokumen agar lebih aplikatif dan tepat sasaran. Dengan menghimpun berbagai perspektif strategis tersebut, dokumen RPKD diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif semata, namun menjadi panduan komprehensif yang mampu menjawab dinamika sosial di Kota Makassar secara efektif.

Di sesi awal, tim fasilitator menyajikan sejumlah poin utama dari RPKD Kota Makassar yang telah disusun. Dalam kesempatan ini, tim fasilitator menggarisbawahi urgensi pemanfaatan DTSEN dalam merumuskan kebijakan dan program kemiskinan secara periodik. Data tersebut dipandang sangat membantu pemerintah kota dalam mengarahkan kegiatan secara lebih tepat sasaran, sehingga mengurangi risiko *inclusion error* dan *exclusion error* yang masih menjadi persoalan pada aksi pengentasan kemiskinan dari waktu ke waktu. Selain itu, tim fasilitator juga menunjukkan bahwa kunci utama pengentasan kemiskinan sebagaimana yang diamatkan melalui Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Nasional adalah berada pada implementasi graduasi kemiskinan berdasarkan empat pilar strategi pengentasan kemiskinan. Untuk itu, RPKD yang disusun menekankan adalah strategi nafkah berkelanjutan bagi sasaran program anti-kemiskinan di Kota Makassar.



**Gambar 2.** Empat Pilar Graduasi Kemiskinan

Pada sesi berikutnya, tim ahli wali kota yang berlaku sebagai penanggung memberikan masukan berupa pengayaan terhadap naskah akhir RPKD yang disusun. Perwakilan dari komunitas disabilitas menyoroti aspek pembangunan sosial inklusif yang harus senantiasa melibatkan kelompok disabilitas secara aktif. Penanggung mengomentari bahwa naskah dokumen yang dipaparkan belum banyak mengaitkan strategi dan program pengentasan kemiskinan dengan kelompok disabilitas, sementara realitas penyandang disabilitas hampir sepenuhnya beririsan dengan dimensi kemiskinan. Hal ini menjadi catatan penting bagi tim penyusun untuk menekankan substansi tanggapan tersebut pada bagian program hingga subkegiatan.

Sementara itu, penanggung berikutnya yang merupakan perwakilan akademisi memandang bahwa naskah akhir RPKD sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan, meskipun masih belum cukup meyakinkan pada penentuan anggaran oleh masing-masing perangkat daerah. Penanggung berpesan bahwa arahan dokumen ini bersifat jangka menengah (lima tahun), sehingga rumusan penganggaran tidak seharusnya konstan sepanjang periode implementasi. Terakhir, penanggung yang merupakan ahli perencanaan dan berpengalaman di birokrasi menyarankan agar empat pilar strategi pengentasan kemiskinan menjadi payung bagi program per urusan pemerintahan. Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan akan relatif mudah untuk dipetakan dan dipantau kebelanjutannya melalui skema graduasi yang dibahas sebelumnya.

Sebagai bentuk penyempurnaan dokumen, tim Bappeda diberikan waktu selama satu minggu untuk mengakomodasi berbagai masukan yang diperoleh melalui forum diseminasi. Periode tersebut dimanfaatkan untuk menelaah, menyelaraskan, dan mengintegrasikan setiap input yang relevan ke dalam substansi dokumen. Setelah proses penyempurnaan selesai, dokumen RPKD Kota Makassar Tahun 2025–2029 kemudian didiseminasikan dalam bentuk hard copy kepada Pemerintah Kota Makassar secara umum.

#### **D. Kesimpulan**

Komitmen kuat terhadap upaya penurunan tingkat kemiskinan di Kota Makassar ditunjukkan melalui berbagai kebijakan dan langkah strategis yang telah dirancang serta dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Keseriusan tersebut tercermin tidak hanya dalam pelaksanaan program, tetapi juga dalam penguatan aspek regulasi dan kelembagaan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sejumlah perangkat hukum telah ditetapkan untuk mendukung agenda tersebut, termasuk penyusunan dokumen RPKD yang berfungsi sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah dalam mengarahkan kebijakan dan program agar lebih terfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai pendekatan strategis juga telah dirumuskan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Salah satu upaya utama dilakukan dengan memperluas kesempatan masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan formal melalui peningkatan akses dan keterjangkauan layanan pendidikan. Di bidang kesehatan, peningkatan mutu pelayanan menjadi fokus penting, termasuk upaya menurunkan angka kematian, mengendalikan penyakit kronis, serta mempercepat penanganan stunting. Pemerintah daerah juga mendorong penyediaan infrastruktur dasar yang memadai bagi rumah tangga miskin, seperti akses terhadap listrik, ketersediaan air minum yang layak dan berkelanjutan, serta fasilitas sanitasi yang memadai.

Selain itu, peningkatan kesempatan kerja menjadi bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan. Berbagai peluang kerja didorong melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif serta penyediaan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok miskin dan pekerja di sektor informal. Pada saat yang sama, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat terus diperkuat melalui pengembangan kewirausahaan baru dan dukungan terhadap usaha masyarakat miskin, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketahanan pangan rumah tangga miskin juga mendapat perhatian melalui upaya menjaga ketersediaan stok pangan, menstabilkan harga, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pangan beserta bantuan sumber pangan lainnya.

Dalam rangka mendukung efektivitas program penanggulangan kemiskinan,

cakupan perlindungan sosial terus diperluas, termasuk melalui peningkatan peran dan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga miskin. Di sisi lain, tata kelola program penanggulangan kemiskinan diperkuat melalui peningkatan koordinasi kelembagaan serta perbaikan dan pemutakhiran basis data kemiskinan agar lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Di sisi lain, upaya pengendalian serta evaluasi program harus dilakukan secara berkala agar setiap intervensi yang dijalankan dapat memberikan dampak yang optimal dan tepat sasaran. Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) juga menjadi langkah penting, terutama melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran program, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta peningkatan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung agenda penurunan kemiskinan di Kota Makassar.

Kegiatan pendampingan penyusunan dokumen RPKD Kota Makassar Tahun 2025–2029 masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama pada kualitas dan integrasi data kemiskinan yang belum sepenuhnya akurat serta keterbatasan waktu pendampingan dalam melakukan validasi data dan penguatan kapasitas perangkat daerah secara lebih mendalam. Oleh karena itu, pada kegiatan selanjutnya diperlukan pengembangan sistem basis data terintegrasi yang lebih komprehensif serta penyediaan waktu pendampingan yang lebih panjang agar proses perencanaan dan penyusunan program penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

### **E. References**

- Ahimah-Agyakwah, S., Nketiah-Amponsah, E., & Agyire-Tettey, F. (2022). Urbanization and poverty in Sub-Saharan Africa: evidence from dynamic panel data analysis of selected urbanizing countries. *Cogent Economics and Finance*, *10*(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2109282>
- Blake, G. O., & Gibbison, G. (2025). Proxy means test for targeting welfare benefits in Jamaica. *Development Policy Review*, *43*(2), e12828. <https://doi.org/10.1111/DPR.12828>
- Doshmangir, L., Sanadghol, A., Kakemam, E., & Majdzadeh, R. (2025). The involvement of non-governmental organisations in achieving health system goals based on the WHO six building blocks: A scoping review on global evidence. *PLoS ONE*, *20*(1 January). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0315592>
- Ha, N. M., Dang Le, N., & Trung-Kien, P. (2021). The impact of urbanization on poverty reduction: An evidence from Vietnam. *Cogent Economics and Finance*, *9*(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1918838>
- Huang, F., Li, W., Jin, S., Yue, M., Shuai, C., Cheng, X., & Shuai, Y. (2022). Impact pathways of photovoltaic poverty alleviation in China: Evidence from a systematic review. *Sustainable Production and Consumption*, *29*, 705–717. <https://doi.org/10.1016/j.SPC.2021.11.015>
- Karki, S. K. (2024). Determinants of community engagement and its role in income poverty reduction: Evidence from Jajarkot, Nepal. *Heliyon*, *10*(13). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33534>
- Liddle, B. (2017). Urbanization and Inequality/Poverty. *Urban Science*, *1*(4), 35. <https://doi.org/10.3390/urbansci1040035>

- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Pub. L. 53 (2020).
- Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 Tentang Badan Percepatan Pengentasan kemiskinan, Pub. L. 163 (24 C.E.).
- Pira, M., Fleet, G., & Moir, R. (2024). Design Thinking for Social Change: Exploring Stakeholder Collaboration in Poverty Alleviation. *Journal of Sustainability Research*, 6(3). <https://doi.org/10.20900/jsr20240037>
- Ravallion, M., Chen, S., & Sangraula, P. (2007). *New Evidence on the Urbanization of Global Poverty*. <http://econ.worldbank.org>.
- Reddy, A. A., Sarkar, A., & Onishi, Y. (2022). Assessing the Outreach of Targeted Development Programmes—A Case Study from a South Indian Village. *Land*, 11(7). <https://doi.org/10.3390/land11071030>
- Sanadgol, A., Doshmangir, L., Majdzadeh, R., & Gordeev, V. S. (2021). Engagement of non-governmental organisations in moving towards universal health coverage: a scoping review. *Globalization and Health*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s12992-021-00778-1>
- Tsai, W. H., & Tian, G. (2022). The Role of China's County-level Research Offices in Policy Adaptation. *Journal of Chinese Political Science*, 27(4), 661–679. <https://doi.org/10.1007/s11366-021-09770-3>
- Vernooy, R. (2022). Does crop diversification lead to climate-related resilience? Improving the theory through insights on practice. In *Agroecology and Sustainable Food Systems* (Vol. 46, Number 6, pp. 877–901). Taylor and Francis Ltd. <https://doi.org/10.1080/21683565.2022.2076184>
- Zikargae, M. H., Woldearegay, A. G., & Skjerdal, T. (2022). Assessing the roles of stakeholders in community projects on environmental security and livelihood of impoverished rural society: A nongovernmental organization implementation strategy in focus. *Heliyon*, 8(10). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10987>